

**PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN**

**Anak Agung Eriek Estrada¹
I Wayan Wenagama²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
E-mail: gung.erik1@yahoo.com

ABSTRAK

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menggunakan penggabungan dari deret berkala (*time series*) dengan data *cross section* dari tahun 2009 – 2013. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner (daftar pertanyaan). Teknik analisis data menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program *Eviews 6*. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series*) dan kerat lintang (*cross-section*). Hasil penelitian menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi (X_1), indeks pembangunan manusia (X_2) dan tingkat pengangguran terbuka (X_3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Bali periode 2009-2013 dan laju pertumbuhan ekonomi (X_1), indeks pembangunan manusia (X_2) dan tingkat pengangguran terbuka (X_3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Bali periode 2009-2013.

Kata kunci: laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan

ABSTRACT

The data used in this study is secondary data using a combination of periodic series (time series) with cross section data from 2009 - 2013. The data used in the study was obtained through literature studies as a method of collecting data, so that sampling techniques and questionnaires are not needed (a list of questions). Data analysis technique uses data panel analysis as a data processing tool using program Eviews 6. Analysis using data panels is a combination of time-series and cross-section. The results showed the rate of economic growth (X_1), the human development index (X_2) and the open unemployment rate (X_3) simultaneously had a positive and significant effect on poverty levels in the province of Bali 2009-2013 and the rate of economic growth (X_1), human development index (X_2) and open unemployment rate (X_3) partially have a positive and significant effect on poverty levels in the province of Bali for the period 2009-2013.

Keywords: economic growth rate, human development index, unemployment rate, poverty level

PENDAHULUAN

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup (Husna, dan Muhammad, 2017). Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah- masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan (Whisnu Adi, 2011).

Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD'45, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal itu berarti, hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga Negara, adalah tugas pemerintah untuk menjamin

terwujudnya hal itu. Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003).

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan (Kemenuh dan Wenagama, 2017).

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Fajrii *et al*, 2016). Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan social dan politik. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan,

selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara (Kusuma, 2016). Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi (Darmawan dan Wenagama, 2017).

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia (Sukmaraga, 2011). Menurut M. Nasir dalam Ernawati (2012) permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Pelaksanaan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan di daerah. Indonesia terdiri dari wilayah provinsi, kabupaten, kota dan daerah yang lebih kecil ruang lingkupnya. Jika dihubungkan dengan pelaksanaan pembangunan sebelumnya (era orde baru), lebih bersifat sentralistik daripada bersifat desentralistik. GBHN (1999-2004) menyatakan bahwa pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan (Erawan, 2003).

Selain itu, salah satu tujuan pembangunan adalah mengurangi pengangguran, dengan sendirinya dapat menambah lapangan kerja bagi

masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut (Zulhanafi dkk, 2013). Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan juga di arahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan syarat utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan (Rukini dan Esthisatari, 2015).

Menurut Kartasmita (1996) kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Dengan menggunakan batasan kualitas dan material, Kemiskinan di artikan ketidakmampuan untuk meraih standar hidup minimal. Dalam arti yang luas kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi tidak sebatas pada belum dapat memenuhi kebutuhan dasar namun juga secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Alit dan Sudiana, 2013).

Sehubungan dengan penyebab kemiskinan agar kemiskinan tidak semakin akut, maka pemerintah terutama pemerintah daerah harus meletakkan kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus menjadi pusat perhatian untuk cepat ditanggulangi. Beberapa ahli berpendapat pendekatan yang dianggap cukup jitu dalam penanggulangan kemiskinan adalah menciptakan aktivitas ekonomi di

daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menciptakan pembangunan ekonomi (Yarlina, 2012).

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah Republik Indonesia yang dikenal dunia sebagai salah satu tujuan wisata yang paling banyak diminati. Pariwisata sebagai pencetak rupiah bagi Provinsi Bali menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan penduduk. Namun, ironisnya, di balik majunya industri pariwisata di Pulau Dewata itu, kemiskinan masih mewarnai sosial ekonomi penduduknya.

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali memperlihatkan pengaruh yang positif. Tabel 1 menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan sebesar 4,88 persen dan turun menjadi 3,95 persen pada tahun 2012, kemudian naik menjadi 4,49 persen di tahun 2013. Selengkapnya perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Persentase Penduduk Miskin dirinci per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009 – 2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jembarana	6,80	8,11	6,56	5,74	5,56
2	Tabanan	4,99	6,96	5,62	4,90	5,21
3	Badung	3,28	3,23	2,62	2,16	2,46
4	Gianyar	5,76	6,68	5,40	4,69	4,27
5	Klungkung	5,23	7,58	6,10	5,37	7,01
6	Bangli	5,18	6,41	5,16	4,52	5,45
7	Karangasem	6,37	7,95	6,43	5,63	6,88
8	Buleleng	5,95	7,35	5,93	5,19	6,31
9	Denpasar	2,20	2,21	1,79	1,52	2,07
	Bali	4,88		4,59	3,95	4,49

Sumber: BPS Provinsi Bali 2014

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh suatu wilayah atau dikenal dengan istilah Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). PDRB ini merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dan juga memperlihatkan struktur perekonomian regional.

Pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi yang diwujudkan melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah dari sektor ekonomi primer ke sektor ekonomi sekunder dan tersier yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara tidak bisa dilepaskan dari gejolak ekonomi dunia. Terlebih lagi dalam sistem ekonomi terbuka, jika terjadi gejolak pada ekonomi internasional akan memberikan imbas terhadap perekonomian suatu negara, termasuk pula wilayah yang lebih kecil. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Todaro (2000) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), (2) meningkatnya rasa harga

diri (*self esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi suatu daerah juga bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan daerah dan hasil-hasil pembangunan tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Tabel 1.2 menunjukkan Tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Bali pada tahun 2009-2013.

Tabel 2.
Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi dirinci per Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali tahun 2009 – 2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jembarana	4,28	4,57	5,61	5,90	5,26
2	Tabanan	5,44	5,68	5,82	5,91	6,03
3	Badung	6,39	6,48	6,69	7,30	6,44
4	Gianyar	5,93	6,04	6,76	6,79	6,41
5	Klungkung	4,91	5,43	5,81	6,04	5,72
6	Bangli	5,71	4,97	5,84	5,99	5,61
7	Karangasem	5,01	5,09	5,19	5,73	5,98
8	Buleleng	6,10	5,85	6,11	6,52	6,73
9	Denpasar	6,53	6,57	6,77	7,18	6,94
	Bali	5,33	5,83	6,49	6,65	6,05

Sumber: BPS Provinsi Bali 2014

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu negara. IPM sebagai suatu indikator ukuran kualitas hidup manusia dibangun melalui 4 komponen dasar yaitu: angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian di bidang pendidikan. Jika dunia pendidikan sudah jeblok, maka

kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter sekaligus mempertahankan jati diri manusia, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai komponen yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bali yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Tabel 3 Menunjukkan Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali pada tahun 2009-2013.

Tabel 3.
Persentase Indeks Pembangunan Manusia dirinci per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009 – 2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jembrana	72,45	72,69	73,06	73,62	74,02
2	Tabanan	74,26	74,57	75,07	75,55	76,04
3	Badung	74,49	75,02	75,29	75,69	76,92
4	Gianyar	72,43	72,73	73,32	74,49	75,36
5	Klungkung	70,19	70,54	70,99	71,76	72,17
6	Bangli	70,21	70,71	71,21	71,80	72,28
7	Karangasem	66,06	66,42	66,78	67,83	68,74
8	Buleleng	70,26	70,69	71,14	71,93	72,52
9	Denpasar	77,56	77,94	78,30	78,80	79,37
	Bali	71,52	72,17	72,84	73,49	74,11

Sumber: BPS Provinsi Bali 2014

Yani Mulyaningsih, 2012 menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja (BPS).

Tingkat pengangguran sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja), besarnya angkatan kerja ini dapat menekan ketersediaan lapangan kerja di pasar kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua komponen yaitu orang yang menganggur dan orang yang bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada. Tabel 4 menunjukkan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali pada tahun 2009-2013.

Tabel 4.
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dirinci per Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali tahun 2009 – 2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jembrana	2,23	2,54	2,17	1,76	3,39
2	Tabanan	2,73	1,07	1,80	2,22	0,79
3	Badung	3,20	1,25	2,30	1,60	0,77
4	Gianyar	2,91	2,36	2,16	1,72	2,16
5	Klungkung	3,73	3,59	1,78	2,05	2,12
6	Bangli	1,42	0,65	1,00	0,95	0,75
7	Karangasem	3,32	2,82	1,99	1,34	1,34
8	Buleleng	2,34	3,26	1,97	3,15	2,13
9	Denpasar	5,19	6,57	3,69	2,41	2,64
	Bali	3,13	3,06	2,32	2,04	1,79

Sumber: BPS Provinsi Bali 2014

Lincoln Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Namun, kadangkala terdapat pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga dengan banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan sedikit.

Banyak pekerja yang mandiri disektor informal, bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*Word Bank*, 2004). Selain itu kemiskinan juga merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, *gender*, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Hutajulu dan Antonia, 2012).

Kuznet (2001) dalam Permana (2012), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Wongdesmiwati (2009) menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti investasi melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2008) yang berjudul “Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004”. Penelitian ini menggunakan metode Panel Data dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Menurut Yani Mulyaningsih (2008) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prastyo (2010) dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan”. Tulisannya meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani (2001) dengan judul “Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester

Greer & Horbecke”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup (Lewis, 2006). Menurut Badan Pusat Statistik (2013), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 284.009 per orang per bulan. Penetapan angka Rp 284.009 per orang per bulan tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari. Terkait dengan definisi

kemiskinan adalah pengukuran kemiskinan. Pengukuran kemiskinan digunakan untuk mengetahui siapa yang layak menjadi orang miskin (Gafar dan Michael, 2011). Kemiskinan dapat di ukur dengan berbagai cara, dari definisi resmi dan pendapatannya sendiri, sebagian besar cara tersebut yang akan mengetahui tingkat kemiskinan (Hilary, 2006).

Menurut (Khan, 2001) yang melakukan analisis perbandingan mengenai delapan negara asia dalam upaya pengurangan kemiskinan menyimpulkan, bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita merupakan tenaga penggerak utama di belakang penurunan angka kemiskinan.

Ketika pendapatan perkapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwa ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah, sehingga di banyak NSB tidak ada *trade off* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan (Mudrajad Kuncoro, 2006). Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan

faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Menurut Alm & Roy (2001) pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi)

Menurut UNDP (1990:1), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk mempebesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“a process of enlarging people’s choices”*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Sebagaimana dikutip dari UNDP (1995:118), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya adalah: Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian; Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja; Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal; Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan; dan pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut adalah dinyatakan sebagai indikator. Dengan kata lain, indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (1) sah (*valid*), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut; (2) objektif, untuk hal yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda; (3) sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator; (4) spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian

perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat (Lewis, 2001).

Dalam kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; *Human Development Index*) merupakan salah satu alternatif yang bisa diajukan. Indikator ini, disamping mengukur kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi (daya beli) masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai *purcashing power parity* (ppp).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, dipilihnya lokasi ini, karena penelitian ini terkait dengan jumlah tingkat kemiskinan, dimana berdasarkan data jumlah kemiskinan di Provinsi Bali (data sebelumnya pada Tabel 1) masih tergolong sangat besar, dan tingkat pengangguran yang terdapat di tiap kabupaten/kota masih tergolong besar pula.

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner (daftar pertanyaan). Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2009 - 2013. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta dari *browsing website internet* yang terkait dengan masalah kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta pengangguran.

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program *Eviews 6*. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series*) dan kerat lintang (*cross section*).

Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (1)$$

dimana N adalah banyaknya data *cross-section*. Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (2)$$

dimana T adalah banyaknya *data time-series*. Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (3)$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana :

- N = banyaknya observasi
- T = banyaknya waktu
- N × T = banyaknya data panel

Model fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui kemiskinan di Provinsi Bali yaitu:

$$K0 = f (LPE, IPM, TPT,)..... (4)$$

$$K0it = \beta0 + \beta1LPEit + \beta2IPMit + \beta3TPTit + Uit.....(5)$$

dimana:

- K0 = persentase kemiskinan dalam persen.
- LPE = laju PDRB harga konstan 2000 dalam persen.
- IPM = pendidikan atau angka melek huruf dalam persen
- TPT = pengangguran dalam persen.
- i* = *cross section*.
- t* = *time series*.
- $\beta0$ = konstanta.
- $\beta1, \beta2, \beta3$ = koefisien.
- U* = *error*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pengangguran terbuka (X_1), indeks pembangunan manusia (X_2) dan tingkat pengangguran terbuka (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y) dengan menggunakan *Eviews Versi 7*. Dari analisis data yang dilakukan diperoleh hasil seperti disajikan di Tabel 5.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5 didapat persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 30,73 - 1,16 X_1 - 0,25X_2 + 0,15X_3(6)$$

Sebelum persamaan tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan periode 2009-2013, maka dilakukan beberapa uji terlebih dahulu.

Tabel 5.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.73656	3.702503	8.301561	0.0000
X1	-1.160911	0.291361	-3.984446	0.0003
X2	-0.250742	0.062722	-3.997655	0.0003
X3	0.153960	0.136136	1.130927	0.2647
R-squared	0.688231	Mean dependent var		5.173111
Adjusted R-squared	0.665418	S.D. dependent var		1.760662
S.E. of regression	1.018421	Akaike info criterion		2.959070
Sum squared resid	42.52440	Schwarz criterion		3.119662
Log likelihood	-62.57908	Hannan-Quinn criter.		3.018937
F-statistic	30.16916	Durbin-Watson stat		2.144329
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2016

Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (K_0) sebesar 1,16 memiliki arti, jika laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 1,16 persen dengan asumsi variabel indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka konstan.

Koefisien regresi variabel indeks pembangunan manusia (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (K_0) sebesar -0,25 memiliki arti bahwa jika indeks pembangunan manusia naik sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,25 persen dengan asumsi variabel laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka konstan.

Koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (K_0) sebesar 0,15 memiliki arti, jika nilai tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,15 persen dengan asumsi laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia konstan.

Berdasarkan nilai F_{hitung} yang diperoleh dari hasil regresi dengan program *Eviews 6* nilai F_{hitung} 30,16 dan nilai sig=0,00, hal ini berarti pada tingkat

signifikansi 5 persen (0,05) maka H_0 ditolak atau H_1 diterima yang berarti bahwa variabel laju pertumbuhan ekonomi (X_1), indeks pembangunan manusia (X_2) dan tingkat pengangguran terbuka (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Bali periode 2009-2013.

Berdasarkan nilai t_{hitung} yang diperoleh dari hasil regresi dengan program *Eviews 6* nilai t_{hitung} -3,98 dan nilai $sig=0,00$, hal ini berarti pada tingkat signifikansi 5 persen (0,05) maka H_0 ditolak atau H_1 diterima yang berarti bahwa variabel laju pertumbuhan ekonomi (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Bali periode 2009-2013.

Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa koefisien dari Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,16 dan signifikan secara statistik artinya bahwa adanya kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,16 persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin.

Kuznet (2001) dalam Permana dan Arianti (2012), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Wongdesmiwati (2009) menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia

dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan PDB riil dan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti investasi melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia.

Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian sebelumnya, oleh Deny Tisna Amijaya (2008) yang berjudul “Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004”. Penelitian ini menggunakan metode Panel Data dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan nilai t_{hitung} yang diperoleh dari hasil regresi dengan program *Eviews 6* nilai t_{hitung} (-3,99) dengan nilai sig 0,00, hal ini berarti pada tingkat signifikansi 5 persen (0,05), maka H_0 ditolak atau H_1 diterima yang berarti bahwa variabel indeks pembangunan manusia (X_2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Bali periode 2009-2013.

Menurut Yani Mulyaningsih (2008) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga

dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian sebelumnya oleh Prastyo (2010) dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan”. Tulisannya meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan nilai t_{hitung} yang diperoleh dari hasil regresi dengan program *views* 6 nilai t_{hitung} 1,13 dengan nilai sig sebesar 0,26 pada tingkat signifikansi 5 persen (0,05), maka H_0 diterima atau H_1 ditolak yang berarti, bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X_3) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Bali periode 2009 -2013.

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran bertanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 1% tidak menurunkan kemiskinan tetapi menaikkan kemiskinan sebesar 0,15%. Kenaikan tingkat pengangguran yang bertanda positif akan mengakibatkan kemiskinan menguat.

Pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai. Seseorang yang menganggur tidak memiliki pendapatan dari pekerjaannya. Kebutuhan masyarakat

yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jika mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya tidak dapat memenuhi kebutuhannya baik dan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi dampaknya mereka masuk dalam kategori penduduk miskin serta mengakibatkan membengkaknya jumlah penduduk miskin.

Hasil penelitian ini tidak bersedesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani (2001) dengan judul “Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

SIMPULAN

Laju pertumbuhan ekonomi (X_1), indeks pembangunan manusia (X_2) dan tingkat pengangguran terbuka (X_3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali periode 2009-2013. Secara parsial variabel laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali periode 2009-2013. Secara parsial variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali periode 2009-2013.

Secara parsial variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali periode 2009-2013.

Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih pada sektor pendidikan khususnya daerah Bali , termasuk membantu memfasilitasi seluruh rancangan yang berkaitan dengan pendidikan , dengan terciptanya sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan keadaan persaingan pada era ini, dengan sendirinya dapat mengurangi angka kemiskinan yang timbul akibat kurangnya skill individu maupun lapangan pekerjaan.

Untuk pemerintah diharapkan agar lebih mewujudkan jalur strategi pembangunan terutama pro-masyarakat miskin agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan melakukan pemberdayaan masyarakat dan pro-lapangan kerja agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan investasi pada pekerja.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur pendidikan, kesehatan dan bidang ekonomi, sehingga dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk memacu pertumbuhan ekonominya dengan memprioritaskan pelayanan prima dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi.

Kedepannya, diharapkan bagi seluruh masyarakat Bali dan komponennya untuk terus berbenah dalam pemerataan pembangunan khususnya Pariwisata yang merupakan daya tolong perekonomian Bali yang pertama. Sehingga di harapkan

bisa memberikan dampak yang signifikan seperti , lapangan pekerjaan, modal, investasi dan sebagainya. Yang nantinya diharapkan mampu untuk mengurangi Tingkat Kemiskinan pada tiap kabupaten/Kota di Provinsi Bali itu sendiri.

REFERENSI

- Alit, Wiradyatmika A.A. Gde dan Ketut Sudiana. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Alm, James, Robert H. Aten & Roy Bahl. 2001. 'Can Indonesia decentralise successfully? Plans, problems and prospects'. *Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol.37, No.1, Hal: 83–102*.
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan. Ed. 3*, STIE YKPN: Yogyakarta.
- Anonymous. *Bali Dalam Angka 2010-2014*, Badan Pusat Statistik: Denpasar.
- . 2010. *PDRB Provinsi Bali*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- . 2014. *Bali dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- . 2014. *PDRB Provinsi Bali*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Darmawan, Agus Pande dan I Wayan Wenagama. Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 6(10), pp. 1868-2101.
- Erawan. 2003. "Strategi Pembangunan Ekonomi Makro Propinsi Bali" dalam *Strategi Pembangunan Ekonomi Bali, Menjawab Tantangan Global, Suarsana(editor)*. PT. Bali Post: Denpasar.
- Ernawati. N. 2012. Pemetaan Potensi Penduduk Miskin Kabupaten Bantul, Jogjakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 1, (No.03): 475-481.
- Fajrii, Muhammad., Delis, Arman., dan Amzar, Yohanes Vyn. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol.9, No.2, Hal: 99 – 107*.
- Gafar, Mukaila Raji dan Michael. 2011. Economic Growth and Poverty Reduction In Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*.

- Hilary, W. Hoynes. 2006. Poverty in America: Trends and Explanations. *Journal of Economic Perspectives*.
- Husna, Nizza Al dan Muhammad Halley Yudhistira. 2017. Studi Empirik Interaksi Strategis Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol.10, No.2, Hal: 113 – 124*.
- Hutajulu, Halomoan, Agustina Sanggrangbano dan Antonia K Bonay. 2012. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol.5 No.2, Hal: 87-100*.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka CIDESINDO.
- Kemenuh, Ida Bagus Adi Mahaputra dan I Wayan Wenagama. Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Terhadap Pendapatan Keluarga KK Miskin. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 6(9), pp. 1628-1867
- Khan, A, R. 2001. A Comparative Analysis of Selected Asian Countries. SEPED/DBP of UNDP.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Pertama*, YKPN: Yogyakarta.
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol.9, No.1, Hal: 1-11*.
- Lewis, Blane D. 2001. The New Indonesian Equalisation Transfer. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.37, No.3, Hal: 325-343*.
- Lewis, Blane D. 2006. Local Government Taxation: An Analysis Of Administrative Cost Inefficiency. *Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol.42, No.2, Hal: 213-233*.
- Permana, A.Y. dan Arianti, F. 2012. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009. *Diponegoro Journal Of Economics, Vol. 1, (No.3) : 1-8*.
- Prastyo, A.A. 2010. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Rukini, Putu Simpen Arini., dan Nawangsih, Esthisatari. 2015. Peramalan. Jumlah Kunjungan Wistawan Mancanegara (Wisman) ke Bali Tahun 2019: Metode Arima. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol.8, No.2, Hal: 136 – 141*.
- Sukmaraga, Prima. 2011. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk

Miskin Di Jawa Tengah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro*.

Todaro, Michael and Stephen C. Smith. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 1, Edisi Ketujuh*. Erlangga: Jakarta.

Wongdesmiwati. 2009. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Analisis Ekonometrika*. Tersedia: <http://www.wordpress.com>. Diakses tanggal 10 Desember 2013.

Yarlina, Yacoub. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran, terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak*.

Zulhanafi dkk. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Produktifitas dan Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Journal Kajian Ekonomi, Vol.II, No.03*.